

# RENCANA KERJA 2024



## **BAPENDA KAB. BREBES**

Jl. Veteran No. 11 Brebes

Email : [bapenda.brebeskab@gmail.com](mailto:bapenda.brebeskab@gmail.com)

Website : [bapenda.brebeskab.go.id](http://bapenda.brebeskab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes - 52212  
Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**Nomor : 973/1119/VII/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 perlu disusun Rencana Kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 12 Juli 2023

**KEPALA BAPENDAKABUPATEN BREBES**

  
**SUBANDI, SE, MSI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690711 199103 1 010

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhaanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes (Bapenda) Tahun 2024.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini, seluruh karyawan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan disiplin kerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat waktu sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kemudian apabila isi dan materi Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, maka segala masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja yang akan datang sangat kami harapkan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES



SUBANDI, SE, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Keputusan Penetapan Rencana Kerja 2024

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    I.1. Latar Belakang ..... 1

    I.2. Landasan Hukum..... 2

    I.3. Maksud dan Tujuan..... 3

    I.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..... 7

    II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan  
        Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 7

    II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..... 11

    II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 12

    II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 15

    II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 26

    III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 26

    III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 28

    III.3. Program dan Kegiatan..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 39

BAB V PENUTUP ..... 41

DAFTAR TABEL

|              |                                                                                                                |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel T-C.29 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Lalu ..... | 9  |
| Tabel T-C.30 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                             | 11 |
| Tabel T-C.31 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....                                                            | 16 |
| Tabel T-C.32 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....                                     | 25 |
| Tabel T-C.33 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....                                          | 31 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD juga dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja BAPENDA) Kabupaten Brebes tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
- j. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
- k. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
- l. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2024.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes selama tahun 2024.

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** berisi uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan atas temuan-temuan setelah proses tersebut disertai catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,** yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3. Program dan Kegiatan,** berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, pada tahun 2023 memuat 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan dengan total nilai Rp. 17.935.159.000,00. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan kegiatan, pagu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 sejumlah 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total nilai Rp. 20.314.119.854

Realisasi penyerapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| NO    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         | ANGGARAN          | REALISASI         | %     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 14.603.437.469,00 | 14.144.983.248,00 | 96,86 |
| 1.1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 63.162.000,00     | 50.337.450,00     | 79,70 |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 63.162.000,00     | 50.337.450,00     | 79,70 |
| 1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 10.027.269.310,00 | 9.770.875.126,00  | 97,44 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 10.027.269.310,00 | 9.770.875.126,00  | 97,44 |
| 1.3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 41.800.000,00     | 41.158.800,00     | 98,47 |
| 1.3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 41.800.000,00     | 41.158.800,00     | 98,47 |

| NO    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                      | ANGGARAN          | REALISASI         | %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1.4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 841.017.819,00    | 815.014.250,00    | 96,91  |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 10.844.900,00     | 10.844.900,00     | 100,00 |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 38.285.300,00     | 37.880.000,00     | 98,94  |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 30.852.000,00     | 29.400.500,00     | 95,30  |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 95.350.000,00     | 86.812.500,00     | 91,05  |
| 1.4.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 43.415.000,00     | 43.415.000,00     | 100,00 |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 622.270.619,00    | 606.661.350,00    | 97,49  |
| 1.5   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 1.917.350.340,00  | 1.797.345.634,00  | 93,74  |
| 1.5.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 1.587.011.090,00  | 1.482.549.634,00  | 93,42  |
| 1.5.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 330.339.250,00    | 314.796.000,00    | 95,29  |
| 1.6   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 823.376.000,00    | 797.263.308,00    | 96,83  |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 13.340.000,00     | 13.300.000,00     | 99,70  |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 137.262.000,00    | 129.618.388,00    | 94,43  |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 672.774.000,00    | 654.344.920,00    | 97,26  |
| 1.7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 889.462.000,00    | 872.988.680,00    | 98,15  |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 200.600.000,00    | 191.606.880,00    | 95,52  |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 96.100.000,00     | 92.070.800,00     | 95,81  |
| 1.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 592.762.000,00    | 589.311.000,00    | 99,42  |
| 2     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 4.447.802.660,00  | 4.230.721.753,00  | 95,12  |
|       | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                             | 4.447.802.660,00  | 4.230.721.753,00  | 95,12  |
| 2.1.1 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                               | 523.654.600,00    | 491.742.200,00    | 93,91  |
| 2.1.2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                    | 375.662.800,00    | 364.690.570,00    | 97,08  |
| 2.1.3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                               | 70.768.000,00     | 53.685.000,00     | 75,86  |
| 2.1.4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                           | 455.298.500,00    | 432.213.750,00    | 94,93  |
| 2.1.5 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                    | 1.682.816.000,00  | 1.656.395.000,00  | 98,43  |
| 2.1.6 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | 108.999.600,00    | 99.848.000,00     | 91,60  |
| 2.1.7 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 1.230.603.160,00  | 1.132.147.233,00  | 92,00  |
|       | Jumlah                                                                                                             | 19.051.240.129,00 | 18.375.705.001,00 | 96,45  |

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan

Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini:

| TABEL T-C.29<br>EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH<br>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES<br>PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022 |                                                                                         |                                                              |                                                    |                                            |                                              |                                               |                                                 |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| No                                                                                                                                           | Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)                       | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>pada Tahun<br>2020 | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>Tahun 2021 | Target Kinerja<br>Renstra pada<br>Tahun 2022 | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2022 | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2022 (%) | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
| 1.                                                                                                                                           | Program Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah /<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah | Potensi dan Angka Ketetapan<br>Pajak Daerah (Milyard Rupiah) | 108,61                                             | 124,43                                     | 107,23                                       | 150,32                                        | 140,20                                          | Bapenda                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                         | Target penerimaan pendapatan<br>daerah (Milyard Rupiah)      | 392,54                                             | 518,51                                     | 428,74                                       | 419,40                                        | 97,82                                           | Bapenda                                    |

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Brebes



Untuk tahun anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah mempunyai usulan anggaran sebesar Rp. 20.314.119.854,00 dijabarkan dalam 2 program, 7 kegiatan dan 29 subkegiatan. Diharapkan pada tahun 2023 keberhasilan kinerja dapat mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2017 - 2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes pada tahun 2022 adalah dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah yang terus menerus dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat. hal ini dapat ditempuh dengan kebijakan:

a. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan cara membangun Sistem Informasi Perpajakan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;
2. Penguatan kelembagaan dan aturan perpajakan dengan memperkuat Landasan Hukum Pajak Daerah;
3. Peningkatan Informasi kepada Publik tentang Pajak Daerah melalui kegiatan Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa.

b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Usaha yang dilakukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi:

- 1. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
- 2. Pengkajian potensi pajak daerah baru;

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pendapatan, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020, realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Brebes

| No | Indikator                               | Kinerja |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|----|-----------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    |                                         | 2018    |           | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           |
|    |                                         | Target  | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (Milyard Rupiah) | 356,09  | 346,91    | 373,89 | 379,08    | 392,59 | 392,54    | 412,22 | 518,51    | 432,83 | 419,39    |

### **II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mempunyai pertumbuhan dengan kecenderungan (*trend*) yang meningkat/positif, sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terus mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil PAD, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, dan perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk pemungutan penerimaan retribusi daerah, diserahkan kepada SKPD pengelola retribusi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selaku koordinator pendapatan daerah berkewajiban membina dan memonitor perkembangan penerimaan retribusi daerah.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran Kewajiban Pembayaran Pajak

Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan.

2. Jangkauan pelayanan perbankan yang kurang luas dan keterbatasan waktu pelayanan perbankan di wilayah desa terpencil.

3. Wajib Pajak Kurang Pro Aktif untuk melaporkan ketika ada perubahan data Objek Pajak;  
Terdapat Objek Pajak yang tidak diketahui Domisili Wajib Pajaknya, tetapi data di SPPT masih menggunakan alamat Wajib Pajak lama (lahan sudah terjual atau berpindahtangan).
4. Penyampaian SPPT dari Desa/Kelurahan ke Wajib Pajak Seringkali terlambat hingga akhir tahun.
5. Perangkat desa yang meninggal atau pensiun tetapi masih menyisakan data tunggakan PBB-P2 yang kemudian digantikan oleh perangkat desa yang baru tetapi belum memahami letak objek pajak dan wajib pajak PBB-P2.
6. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal -kanal pembayaran yang ada tanpa perlu menitipkan ke pamong.

Untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bapenda menempuh cara sebagai berikut:

1. Membangun Aplikasi Sipentol (Sistem Pendataan Tanah Online) sebagai sarana dalam melaksanakan pemutakhiran dan pembentukan basis data pajak daerah pada kegiatan pendataan PBB P2;
2. Pemasangan alat Taping Box pada Wajib pajak menghasilkan perekaman transaksi yang sebenarnya, sehingga potensi pajak yang dikenakan dapat sesuai. Hal ini menekan lost potensi pendapatan pajak
3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal -kanal pembayaran secara langsung;
4. Memberikan apresiasi kepada pemungut pajak perangkat desa yang tertib administrasi dan lunas tercepat dan bagi wajib pajak yang tertib dan tercepat dalam membayar pajak daerah
5. Pendataan ulang terkait data-data wajib pajak yang berubah karena faktor jual beli / pindah kepemilikan, perubahan status dari tanah tanpa bangunan menjadi tanah ada bangunan;

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dituntut untuk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya;
2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah terbatas pada pengelolaan Pajak Daerah saja.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPENDA;
3. Adanya kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan pendapatan daerah;
4. Adanya aplikasi perpajakan dan sistem pembayaran secara on line yang sudah dapat digunakan sampai ke tingkat desa-desa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

- 1 Trend Piutang Pajak Daerah yang selalu naik setiap tahun;
- 2 Volume objek pajak yang menjadi target dalam jumlah besar;
- 3 Nilai Jual Objek Pajak Tanah masih berada jauh di bawah nilai pasar;
- 4 Belum akuratnya data potensi pajak daerah atau adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali;

#### **II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap rancangan awal rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana terlihat pada TABEL T-C.31 berikut ini:

**TABEL T-C.31**  
**Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Brebes**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

| No | Rancangan Awal RKPD                                             |        |                                                                                                                                                                                       |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                        |        |                                                                                                                                                                                       |                |                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    | Program/ Kegiatan                                               | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)                                                                                                               | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                  | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)                                                                                                               | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1  | 2                                                               | 3      | 4                                                                                                                                                                                     | 5              | 6              | 7                                                               | 8      | 9                                                                                                                                                                                     | 10             | 11             |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |        | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)                                                                                                                                        | 84             | 15.340.827.907 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |        | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)                                                                                                                                        | 84             | 12.424.858.614 |
|    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 9              | 47.004.000     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 9              | 39.170.000     |

|  |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                  |    |                |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                  |    |               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 9  | 47.004.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 9  | 39.170.000    |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                                 | 60 | 12.376.953.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Kabupaten Brebes | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                                 | 60 | 9.587.023.325 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Kabupaten Brebes | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 60 | 12.376.953.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Kabupaten Brebes | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 60 | 9.587.023.325 |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                  | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                    | 60 | 24.000.000     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                  | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                    | -  | -             |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 60 | 24.000.000     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                   | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | -  | -             |
|  |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                  |    |                |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                  |    |               |

|  |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis) | 6  | 956.616.107 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Kabupaten Brebes | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis) | 6  | 585.025.289 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                      | 10 | 11.280.000  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                      | 10 | 9.400.000   |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                          | 20 | 49.720.800  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                          | 20 | 41.434.000  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                                     | 20 | 35.062.800  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                                     | 20 | 32.759.000  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                                      | 4  | 99.540.000  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                                      | 4  | 82.950.000  |

|  |                                                                    |                  |                                                                                                                              |    |               |                                                                    |                  |                                                                                                                              |    |               |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                          | 15 | 51.072.000    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Kabupaten Brebes | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                          | 15 | 42.560.000    |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                | 50 | 709.940.507   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                | 50 | 375.922.289   |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah        |                  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)                | 2  | 124.724.000   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)                | 2  | 78.809.000    |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Kabupaten Brebes | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                               | 20 | 74.724.000    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Kabupaten Brebes | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                               | 20 | 48.809.000    |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Brebes | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                  | 20 | 50.000.000    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Brebes | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                  | 20 | 30.000.000    |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                  | Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis) | 3  | 1.193.680.800 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                  | Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis) | 3  | 1.851.521.000 |

|  |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                                                                                                                                                             | 2000 | 17.622.000    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                                                                                                                                                             | 2000 | 14.685.000    |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                                                                                                                                    | 5    | 79.632.000    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                                                                                                                                    | 5    | 108.360.000   |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                                                                                                                      | 3    | 1.096.426.800 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                                                                                                                      | 3    | 1.728.476.000 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis) | 3    | 617.850.000   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis) | 3    | 283.310.000   |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Kabupaten Brebes | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                                                                                                                       | 15   | 250.284.000   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Kabupaten Brebes | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                                                                                                                       | 15   | 173.690.000   |

| Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Brebes | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                        |    | 67.572.000    | 25 | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Kabupaten Brebes | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                        |        | 59.140.000    |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kabupaten Brebes | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit) | 2  | 299.994.000   | 2  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Brebes | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit) | 2      | 50.480.000    |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH     |                  | Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)                      | 66 | 1.974.082.000 |    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                          |                  | Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)                      | 64.400 | 1.039.921.680 |
|                                           |                  | Peningkatan PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)                                       | 74 | 5.680.990.000 |    |                                                                |                  | Peningkatan PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)                                       | 69.500 | 3.337.888.560 |
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah    |                  | Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)                    | 7  | 1.974.082.000 |    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                         |                  | Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)                    | 7      | 1.039.921.680 |
|                                           |                  | Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)                                     | 2  | 5.680.990.000 |    |                                                                |                  | Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)                                     | 2      | 3.337.888.560 |
| Perencanaan pengelolaan pajak daerah      | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                        | 2  | 200.000.000   |    | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                           | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                        | 2      | 49.966.000    |

|  |                                                                                                                           |                  |                                                                                                    |      |               |                                                                                                                           |                  |                                                                                                                  |      |               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 1    | 250.000.000   | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)               | 1    | 65.483.000    |
|  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)        | 3    | 150.000.000   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 3    | 204.159.800   |
|  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah               | 2    | 3.747.990.000 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                   | 2    | 2.044.219.000 |
|  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Kabupaten Brebes | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)                                         | 1500 | 66.000.000    | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Kabupaten Brebes | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)                                                       | 1500 | 36.250.000    |
|  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                    | 1000 | 250.000.000   | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  | 1000 | 257.106.000   |

|  |                                                       |                  |                                                                                             |    |               |                                       |                  |                                                                                             |    |               |
|--|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | Kabupaten Brebes | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Layanan)                        | 2  | 100.000.000   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Kabupaten Brebes | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Layanan)                        | 0  | -             |
|  |                                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Layanan)                    | 1  | 150.000.000   |                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Layanan)                    | 1  | 20.895.000    |
|  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Kabupaten Brebes | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen) | 12 | 60.000.000    |                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen) | 12 | 51.800.000    |
|  | Penagihan Pajak Daerah                                | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Dokumen)           | 12 | 1.702.000.000 |                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Dokumen)           | 12 | 1.217.419.560 |
|  |                                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen)       | 2  | 260.000.000   |                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen)       | 2  | 153.987.908   |
|  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                          | 2  | 65.000.000    |                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                          | 2  | 40.000.000    |
|  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)   | 3  | 124.000.000   |                                       | Kabupaten Brebes | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)   | 3  | 39.985.000    |

|  |                                                            |                  |                                                                          |   |                |                                                            |                  |                                                                                      |   |                |
|--|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|  | Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah (Laporan) | 4 | 471.000.000    | Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 4 | 155.950.000    |
|  | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Perkembangan Transaksi Pemerintah Daerah                  | 1 | 59.082.000     | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                | Kabupaten Brebes | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah                   | 1 | 40.588.972     |
|  |                                                            |                  |                                                                          |   | 22.995.899.907 |                                                            |                  |                                                                                      |   | 16.802.668.854 |



II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang merupakan usulan dari pemangku kepentingan, sebagaimana terlihat pada tabel T-C. 32 di bawah ini:

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Brebes

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

| No  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)               | (5)             | (6)     |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada tingkat kementerian, lembaga yang selaras dengan pengelolaan keuangan daerah adalah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

**“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif.”**

Sedangkan misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. **Mendorong peningkatan pendapatan daerah;**
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif. Adapun sasarannya yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan revisi UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi yang ditempuh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah terutama yang terkait dengan pendapatan daerah. Sasaran yang diadopsi untuk diimplementasikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang sesuai untuk dijadikan acuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yaitu meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah.

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah misi ketiga yaitu **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif** dan misi keempat yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal**.

Tujuan dari misi ketiga tersebut di atas adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif, di mana sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif yang dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator pencapaiannya.
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan optimalisasi aset secara efisien dan produktif serta mendorong tertib administrasi keuangan daerah, dengan indikator pencapaiannya Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD).

Adapun tujuan dari misi keempat tersebut di atas adalah terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal, di mana

sasaran yang dapat didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi dengan indikator pencapaiannya Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes melakukan penyelarasan tujuan dan sasarannya di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan **peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah** dengan meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah dapat dilihat atau diukur dari nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dari perangkat daerah tersebut.

Dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau dalam mencapai indeks pengelolaan keuangan daerah, salah satu nya dapat ditempuh melalui **peningkatan kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap APBD**.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian daerah atau dalam rangka pencapaian Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP), upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah dengan **mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes** melalui pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam ketetapan pajak buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 s.d Rp. 100.000).

Dari uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa rumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan                                                                  | Sasaran                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes    | Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes |
| 2  | Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah                    | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah                         |
| 3  | Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD | Meningkatnya penerimaan pajak daerah                                     |

### III.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sejalan dengan Visi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu **“BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA”**, serta menyesuaikan dengan misi ketiga untuk **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif**, dan misi keempat untuk **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan**, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Brebes kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi dan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah.

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Brebes

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

| Kode      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktifitas                                                                                                                                    | Rencana Tahun 2024 (Tahun Renja) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Lokasi                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1         | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                     | 4                                | 5                      | 6                              | 7           | 8               | 9                                 | 10                             |
| 1         | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                                |             |                 |                                   |                                |
| 5         | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                        |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                                |             |                 |                                   |                                |
| 5.2.      | KEUANGAN                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        | 16.802.668.854                 |             |                 |                                   | 22.705.910.000                 |
| 5.2.6.1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                               | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)                                                                                                                                        |                                  | 84                     | 12.424.858.614                 |             |                 | 85                                | 15.805.910.000                 |
| 5.2.6.1.1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) |                                  | 9                      | 39.170.000                     |             |                 | 6                                 | 107.627.000                    |

|             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |  |  |    |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|--|--|----|----------------|
| 5.2.6.1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)                                                                              | Kab. Brebes | 9  | 39.170.000    |  |  | 6  | 107.627.000    |
| 5.2.6.1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                              | Kab. Brebes | 60 | 9.587.023.325 |  |  | 60 | 12.406.100.000 |
| 5.2.6.1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                                                                                               | Kab. Brebes | 60 | 9.587.023.325 |  |  | 60 | 12.406.100.000 |
| 5.2.6.1.5   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                                                                                 | Kab. Brebes | 0  | 0             |  |  | 60 | 26.620.000     |
| 5.2.6.1.5.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                                                                                | Kab. Brebes | 0  | 0             |  |  | 60 | 26.620.000     |
| 5.2.6.1.6   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis) | Kab. Brebes | 6  | 585.025.289   |  |  | 6  | 868.649.000    |

|              |                                                                    |                                                                                                               |             |    |             |  |  |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|--|--|----|-------------|
| 5.2.6.1.6.1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | Kab. Brebes | 10 | 9.400.000   |  |  | 10 | 9.742.000   |
| 5.2.6.1.6.2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                        | Kab. Brebes | 20 | 41.434.000  |  |  | 20 | 50.418.000  |
| 5.2.6.1.6.3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                   | Kab. Brebes | 20 | 32.759.000  |  |  | 20 | 28.226.000  |
| 5.2.6.1.6.4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | Kab. Brebes | 4  | 82.950.000  |  |  | 4  | 112.549.000 |
| 5.2.6.1.6.5  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | Kab. Brebes | 15 | 42.560.000  |  |  | 15 | 44.487.000  |
| 5.2.6.1.6.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | Kab. Brebes | 50 | 375.922.289 |  |  | 50 | 623.227.000 |
| 5.2.6.1.7    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis) | Kab. Brebes | 2  | 78.809.000  |  |  | 2  | 569.352.000 |
| 5.2.6.1.7.6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | Kab. Brebes | 20 | 48.809.000  |  |  | 20 | 209.396.000 |
| 5.2.6.1.7.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                   | Kab. Brebes | 20 | 30.000.000  |  |  | 20 | 359.956.000 |

|                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |               |  |  |      |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--|--|------|---------------|
| 5.2.6.1.<br>8   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)                                                                                                                      | Kab. Brebes | 3    | 1.851.521.000 |  |  | 3    | 1.142.670.000 |
| 5.2.6.1.<br>8.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                                                                                                                                                             | Kab. Brebes | 2000 | 14.685.000    |  |  | 2000 | 15.093.000    |
| 5.2.6.1.<br>8.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                                                                                                                                    | Kab. Brebes | 5    | 108.360.000   |  |  | 5    | 181.609.000   |
| 5.2.6.1.<br>8.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                                                                                                                      | Kab. Brebes | 3    | 1.728.476.000 |  |  | 3    | 945.968.000   |
| 5.2.6.1.<br>9   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis) | Kab. Brebes | 3    | 283.310.000   |  |  | 3    | 684.892.000   |
| 5.2.6.1.<br>9.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                                                                                                                       | Kab. Brebes | 15   | 173.690.000   |  |  | 15   | 266.679.000   |

|             |                                                                               |                                                                                                                  |             |        |               |  |  |    |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|--|--|----|---------------|
| 5.2.6.1.9.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                        | Kab. Brebes | 25     | 59.140.000    |  |  | 25 | 57.097.000    |
| 5.2.6.1.9.9 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)                                 | Kab. Brebes | 2      | 50.480.000    |  |  | 2  | 361.116.000   |
|             |                                                                               |                                                                                                                  |             |        |               |  |  |    |               |
| 5.2.6.4     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                         | Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)                                                      | Kab. Brebes | 64,400 | 1.039.921.680 |  |  | 77 | 6.900.000.000 |
|             |                                                                               | Peningkatan PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)                                                                       | Kab. Brebes | 69,500 | 3.337.888.560 |  |  | 68 |               |
| 5.2.6.4.1   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                        | Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)                                                    | Kab. Brebes | 7      | 1.039.921.680 |  |  | 7  | 6.900.000.000 |
|             |                                                                               | Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)                                                                     | Kab. Brebes | 2      | 3.337.888.560 |  |  | 2  |               |
| 5.2.6.4.1.1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                                                        | Kab. Brebes | 2      | 49.966.000    |  |  | 2  | 100.000.000   |
| 5.2.6.4.1.2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)    | Kab. Brebes | 1      | 65.483.000    |  |  | 1  | 200.000.000   |
| 5.2.6.4.1.5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | Kab. Brebes | 3      | 204.159.800   |  |  | 3  | 300.000.000   |

|                   |                                                                                                                           |                                                                                                |             |      |               |  |  |       |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--|--|-------|---------------|
| 5.2.6.4<br>.16    | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | Kab. Brebes | 2    | 2.044.219.000 |  |  | 2     | 2.350.000.000 |
| 5.2.6.4<br>.17    | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)                                     | Kab. Brebes | 1500 | 36.250.000    |  |  | 1.500 | 180.000.000   |
| 5.2.6.4<br>.18    | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                | Kab. Brebes | 1000 | 257.106.000   |  |  | 1.000 | 300.000.000   |
| 5.2.6.4<br>.19    | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Layanan)                           | Kab. Brebes | 2    | -             |  |  | 2     | 300.000.000   |
|                   |                                                                                                                           | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Layanan)                       |             | 1    | 20.895.000    |  |  | 1     |               |
| 5.2.6.4<br>.110   | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)    | Kab. Brebes | 12   | 51.800.000    |  |  | 12    | 80.000.000    |
| 15.2.6.<br>4.1.11 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Dokumen)              | Kab. Brebes | 2    | 1.217.419.560 |  |  | 2     | 2.375.000.000 |
|                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen)          | Kab. Brebes | 12   | 153.987.908   |  |  | 12    |               |

|                   |                                                                                       |                                                                                                          |                |   |             |  |  |   |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------|--|--|---|-------------|
| 15.2.6.<br>4.1.12 | Penyelesaian<br>Keberatan<br>Pajak Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyelesaian<br>Keberatan Pajak<br>Daerah (Dokumen)                              | Kab.<br>Brebes | 2 | 40.000.000  |  |  | 2 | 225.000.000 |
| 15.2.6.<br>4.1.13 | Pengendalian,<br>Pemeriksaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pajak Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pemeriksaan<br>serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah (Dokumen) | Kab.<br>Brebes | 4 | 39.985.000  |  |  | 4 | 160.000.000 |
| 15.2.6.<br>4.1.14 | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Pajak Daerah<br>dan Retribusi<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah<br>(Laporan)      | Kab.<br>Brebes | 4 | 155.950.000 |  |  | 4 | 230.000.000 |
| 15.2.6.<br>4.1.15 | Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah                                  | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah Daerah<br>(Laporan)         | Kab.<br>Brebes | 1 | 40.588.972  |  |  | 1 | 100.000.000 |
|                   |                                                                                       |                                                                                                          |                |   |             |  |  |   |             |

Brebes, 12 Juli 2023

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BREBES



SUBANDI, SE, MSI

NIP. 19690711 199103 1 010

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan tugas fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja, pencapaian Rencana strategis, serta visi dan misi Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 terdapat 2 Program, 7 kegiatan, dan 29 sub kegiatan, yaitu terdiri dari 1 program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, dan 1 program penunjang.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes, dan setelah dilaksanakan Pemetaan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan program penunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan, yaitu:

##### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memuat satu subkegiatan yaitu subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

##### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memuat satu subkegiatan yaitu subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

##### **c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memuat enam subkegiatan, yaitu:

- Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Subkegiatan Bahan Logistik Kantor
  - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memuat dua subkegiatan yaitu:

- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini memuat tiga subkegiatan yaitu:
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memuat tiga subkegiatan yaitu:

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini adalah program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mendukung visi dan misi daerah. Dalam program ini termuat 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan 13 subkegiatan yaitu:

- Subkegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

- Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Subkegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Laporan Pajak Daerah
- Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah
- Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah
- Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja Bapenda) Kabupaten Brebes ini merupakan proses sistematis berkelanjutan yang disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Di samping itu, Renja merupakan sarana yang bermanfaat bagi manajemen dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas. Hal ini dapat terwujud apabila Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes masuk dalam Daftar Skala Prioritas sebagai bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Brebes, 12 Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

  
SUBANDI, SE, MSi  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690711 199103 1 010